

Donald Trump's Political and Rhetorical Strategies in the 2024 United States Presidential Campaign Debate: A Critical Discourse and Populist Rhetoric Analysis

Strategi Politik dan Retoris Donald Trump dalam Debat Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024: Analisis Wacana Kritis dan Retorika Populis”

Yopie A. T. Pangemanan

Universitas Kristen Indonesia Tomohon

yopiepangemanan73@gmail.com

(*) Corresponding Author

yopiepangemanan73@gmail.com

How to Cite: Yopie A.T Pangemanan. (2025). Strategi Politik dan Retoris Donald Trump dalam Debat Kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024: Analisis Wacana Kritis dan Retorika Populis doi: 10.36526/js.v3i2.5477

Received:	Abstract This study examines the political and rhetorical strategies employed by Donald Trump during the 2024 United States presidential debate, focusing on five key tactics: polarization, demonization of opponents, emotional nationalism, anti-institution rhetoric, and personalization of leadership. Utilizing a qualitative approach with critical discourse analysis and rhetorical analysis, the research analyzes the complete transcript of the debate to identify how these strategies construct a populist narrative aimed at mobilizing voter loyalty, delegitimizing political adversaries, and positioning Trump as the sole solution to national crises. The findings reveal that Trump's communication style is not only content-driven but also performative and symbolic, employing emotionally charged language and stark dichotomies to strengthen collective identity among supporters. Polarization is evident in his framing of "us versus them," creating clear boundaries between patriotic citizens and perceived threats such as immigrants and political elites. Demonization tactics involve hyperbolic language portraying opponents as existential dangers, effectively generating fear and anger. Emotional nationalism is invoked through nostalgic references to America's past greatness, reinforcing group cohesion and hope for restoration. Anti-institution rhetoric undermines public trust in media, government, and electoral systems, while personalization of leadership elevates Trump as an indispensable, charismatic figure. While these strategies prove effective in political mobilization, they also raise concerns about increased social fragmentation, erosion of democratic norms, and challenges to institutional legitimacy. This study contributes to the literature on political communication by providing a comprehensive, critical examination of contemporary populist rhetoric within a digital media environment. The results offer valuable insights for scholars, policymakers, and practitioners interested in the dynamics of political discourse and its implications for democratic processes.
Revised:	
Accepted:	
Keywords: Strategi politik, Retorika Populis, Debat Kampanye, Wacana Kritis, Donald Trump	

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 menjadi sorotan global karena perannya dalam menentukan arah politik domestik dan internasional. Debat kampanye sebagai salah satu momen krusial dalam proses demokrasi digunakan para kandidat untuk menyampaikan visi, misi, serta strategi politik (López-García & Pavia, 2019). Donald Trump, sebagai mantan presiden dan calon kuat, dikenal dengan gaya komunikasi yang kontroversial dan memikat. Strategi politik dan retorik yang diterapkannya dalam debat tidak hanya berdampak pada elektabilitas, tapi juga mencerminkan perubahan lanskap komunikasi politik modern. Peran media sosial dan teknologi informasi turut mempercepat penyebaran pesan kampanye. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang strategi komunikasi Trump sangat relevan dalam konteks politik saat ini. Meningkatnya polarisasi dan ketegangan sosial membuat kajian ini semakin penting.

Era digital mengubah cara kandidat berinteraksi dengan publik, dimana pesan kampanye disebar lebih cepat dan luas. Donald Trump memanfaatkan karakteristik ini melalui retorika yang kuat, provokatif, dan sering kali mengundang kontroversi. Pendekatan komunikasi semacam ini berpotensi membangkitkan respons emosional yang intens dari pendukung maupun penentang. Dinamika tersebut menciptakan fenomena politik yang sangat kompleks dan menarik untuk dianalisis. Strategi komunikasi dalam debat berperan penting dalam membentuk opini publik dan preferensi pemilih (McCombs & Valenzuela, 2020). Sebagai medium publik utama, debat kampanye menjadi arena penting untuk menguji efektivitas strategi politik (Sahly et al., 2019).

Berbagai penelitian telah menyoroti fenomena polarisasi sosial dan politik yang meningkat di Amerika Serikat selama dekade terakhir. Studi terdahulu menunjukkan bahwa polarisasi partai politik menyebabkan pembentukan kelompok identitas yang semakin saling bertentangan (Bliuc et al., 2021). Penelitian lain mengungkapkan bahwa polarisasi tidak hanya terjadi di ranah politik formal, tetapi juga merembet ke kehidupan sosial dan budaya masyarakat (McCoy & Somer, 2019). Dalam komunikasi politik, polarisasi sering kali dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperkuat loyalitas kelompok. Beberapa riset mengemukakan bahwa polarisasi retorik dapat meningkatkan keterlibatan politik, tetapi juga memperdalam fragmentasi sosial (Jamal, 2024). Sementara itu, Esau berpendapat bahwa polarisasi yang ekstrem dapat merusak fondasi demokrasi dan menghambat dialog antar kelompok (Esau, 2025). Penelitian lain meneliti bagaimana media sosial mempercepat polarisasi melalui echo chamber dan filter bubble (Rhodes, 2022; Rodilosso, 2024). Temuan-temuan tersebut memberikan landasan penting untuk memahami dampak polarisasi dalam komunikasi politik.

Strategi demonisasi lawan politik juga telah banyak dianalisis dalam literatur komunikasi dan psikologi politik. Menurut Hossain demonisasi merupakan proses sosial-politik yang mengkonstruksi lawan sebagai musuh yang berbahaya dan tidak bermoral (Hossain, 2024). Demonisasi dengan teori identitas sosial, yang menjelaskan bagaimana kelompok menciptakan citra negatif terhadap 'kelompok lain' untuk memperkuat solidaritas internal (Hand, 2020; White, 2024). Dalam konteks komunikasi politik, demonisasi sering dipakai untuk membangkitkan emosi negatif seperti ketakutan dan kebencian (Marino et al., 2024). Retorika demonisasi dapat meningkatkan partisipasi politik tetapi juga memperburuk polarisasi dan konflik (Piazza, 2023). Studi lain juga mengkaji efek jangka panjang demonisasi terhadap budaya demokrasi dan toleransi (Chigbu et al., 2025). Namun, literatur terkait praktik demonisasi dalam debat politik masih terbatas dan memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, riset-riset ini menjadi rujukan penting dalam memahami fungsi dan konsekuensi demonisasi dalam komunikasi politik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis lima strategi politik dan retorik utama—polarisasi, demonisasi lawan, nasionalisme emosional, retorika anti-institusi, dan personalisasi kepemimpinan—dalam satu kajian komprehensif yang berfokus pada debat kampanye Pemilihan Presiden Amerika 2024. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif komunikasi politik, sosiologi, dan kajian media menjadikan studi ini berbeda dari riset-riset sebelumnya yang cenderung memisahkan satu aspek strategi secara terpisah. Fokus pada figur Donald Trump yang masih menjadi pusat perhatian politik memberikan konteks aktual dan relevan, sekaligus menggali dinamika komunikasi dalam era digital dan pasca-truth.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam strategi politik dan retorik Donald Trump dalam debat kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2024. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan penggunaan lima strategi utama yaitu polarisasi, demonisasi lawan, nasionalisme emosional, retorika anti-institusi, dan personalisasi kepemimpinan; (2) menganalisis bagaimana strategi-strategi tersebut diartikulasikan secara retorik selama debat; dan (3) memahami dampak strategi ini terhadap persepsi publik dan dinamika politik kontemporer. Melalui pemahaman yang komprehensif, penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi politik serta menyediakan wawasan praktis bagi para praktisi politik dan pembuat kebijakan. Kajian ini diharapkan

menjadi referensi penting bagi akademisi yang tertarik dengan hubungan antara komunikasi, politik, dan demokrasi dalam konteks era digital. Selain itu, penelitian ini ingin menambah pengetahuan mengenai pola komunikasi yang berdampak pada polarisasi sosial dan kohesi nasional.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi politik yang semakin kompleks dan emosional dalam debat kampanye presiden. Dengan mengungkap pola-pola strategi retorik yang dipakai oleh Donald Trump, penelitian ini membantu mengidentifikasi mekanisme pembentukan opini publik yang dapat memperkuat atau memperlemah proses demokrasi. Implikasi praktis penelitian ini juga berkaitan dengan peningkatan kesadaran bagi politisi dan praktisi komunikasi politik dalam merancang strategi yang lebih etis dan konstruktif. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi media dan masyarakat luas dalam menanggapi pesan-pesan politik yang berpotensi memicu polarisasi dan konflik sosial. Dari perspektif akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori komunikasi politik dengan menyesuaikan pada konteks kontemporer yang dipengaruhi oleh media digital dan budaya pasca-kebenaran. Implikasi sosialnya juga mencakup pemahaman risiko yang mungkin ditimbulkan oleh retorika agresif terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik. Dengan demikian, penelitian ini berperan strategis dalam mendukung demokrasi yang sehat dan dialog politik yang inklusif. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan yang dapat mengkaji strategi komunikasi politik di negara dan konteks lain.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis dan analisis retorika untuk mengkaji strategi politik dan retorik Donald Trump dalam debat kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Data utama berupa transkrip lengkap debat kampanye yang dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola retorik yang mencerminkan lima strategi utama: polarisasi, demonisasi lawan, nasionalisme emosional, retorika anti-institusi, dan personalisasi kepemimpinan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman konteks sosial-politik yang melingkupi komunikasi politik dan bagaimana pesan-pesan tersebut dirancang untuk mempengaruhi audiens. Selain itu, studi ini juga melibatkan kajian literatur pendukung terkait teori komunikasi politik, sosiologi politik, dan media digital sebagai landasan konseptual dan untuk memperkaya interpretasi hasil analisis wacana.

Proses analisis dilakukan dengan tahap awal pengumpulan data yang valid dan relevan dari sumber resmi debat kampanye, kemudian dilanjutkan dengan coding tematik untuk mengelompokkan berbagai bentuk strategi retorik yang muncul. Selanjutnya, analisis wacana kritis digunakan untuk menggali makna tersembunyi, kekuasaan, dan ideologi yang terkandung dalam pesan politik tersebut. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini juga melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil analisis dengan temuan riset sebelumnya dan kajian media terkait. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran holistik dan kritis terhadap strategi komunikasi Donald Trump yang berdampak pada dinamika politik dan persepsi publik. Pendekatan kualitatif ini dipilih agar dapat menangkap nuansa dan kompleksitas komunikasi politik yang sulit diukur dengan metode kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam debat Presiden AS 2024, Donald Trump secara konsisten menerapkan strategi politik dan retorik yang membentuk narasi populis kuat. Strategi-strategi ini bertujuan untuk membangun loyalitas pemilih, mendiskreditkan lawan politik, dan membingkai dirinya sebagai satu-satunya solusi bagi berbagai krisis nasional. Retorika Trump tidak hanya terlihat dari isi ujaran, tetapi juga gaya penyampaian yang performatif dan simbolik. Berikut ini pemaparan lima strategi utama yang dipakai Trump dalam debat tersebut, dengan data berupa kutipan-kutipan langsung dari transkrip debat.

1. Strategi Polarisasi

Trump secara eksplisit menciptakan dikotomi sosial antara kelompok “kami” yang patriotik dan “mereka” yang dianggap merusak negara. Ia menggunakan narasi imigran dan “kriminal” yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat inti. Dengan framing seperti ini, Trump memperkuat identitas kolektif basis pendukungnya sebagai kelompok yang berjuang melawan ancaman eksternal dan internal. Strategi ini efektif dalam memobilisasi loyalitas karena menyederhanakan konflik politik menjadi pertarungan antara pihak baik dan jahat tanpa ruang abu-abu. Namun, narasi semacam ini juga berpotensi memperdalam polarisasi sosial dan meningkatkan ketegangan antar kelompok di masyarakat.

Tabel 1. Strategi Polarisasi

No.	Tindak Tutar
1	"We have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions."
2	"They're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics and also unions."
3	"They're destroying our country. They have no idea what a good economy is."
4	"People want to take their country back. Our country is being lost."
5	"We need walls. We need borders, and we have to have good elections."

2. Strategi Demonisasi Lawan

Trump menggunakan bahasa hiperbolik untuk membangun citra lawannya sebagai ancaman eksistensial terhadap negara dan ekonomi. Demonisasi ini ditujukan untuk melemahkan kredibilitas lawan melalui penyebutan label seperti “Marxist” dan tuduhan kegagalan kebijakan. Narasi yang sarat emosi ini memanfaatkan ketakutan dan kemarahan pemilih sebagai motivasi utama. Dengan demikian, strategi ini efektif dalam menciptakan moral panic dan mempolarisasi pemilih menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Dampaknya adalah berkurangnya ruang dialog rasional dan meningkatnya ketegangan politik.

Tabel 2. Strategi Demonisasi

No.	Tindak Tutar
1	"She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist."
2	"They have destroyed our economy. They have no idea what a good economy is."
3	"She was the border czar... She doesn't want to be called the border czar because she's embarrassed."
4	"She's a horrible negotiator. They sent her in to negotiate, and the war started three days later."
5	"The worst president in the history of our country."

3. Strategi Nasionalisme Emosional

Trump memanfaatkan nostalgia kejayaan masa lalu untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan kebanggaan kolektif. Ia menonjolkan prestasi masa kepresidenannya dan menjanjikan restorasi kejayaan tersebut. Pengulangan slogan “Make America great again, again” menjadi simbol janji restoratif yang mengandung emosi harapan dan kehilangan. Pendekatan ini sangat efektif menggerakkan basis pendukung yang merasakan ketidakpuasan dengan kondisi saat ini. Narasi ini juga mengkonstruksi identitas nasional yang terancam dan harus dipertahankan, memperkuat kohesi kelompok pendukung. Namun, nasionalisme emosional yang terlalu berlebihan berpotensi menimbulkan sikap eksklusif dan intoleran terhadap kelompok lain.

No.	Kutipan Transkrip
1	"I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again."
2	"Make America great again, again."
3	"We made ventilators for the entire world. We got gowns, masks; we did things nobody thought possible."

4	"Our country is a failing nation. We're being laughed at all over the world."
5	"We rebuilt our entire military."

4. Strategi Anti-Institusi

Trump secara konsisten menunjukkan ketidakpercayaan terhadap institusi formal seperti media, pemerintah, dan sistem pemilu. Retorika anti-institusi ini bertujuan mendelegitimasi otoritas tradisional dan menggantinya dengan kepercayaan pada dirinya sebagai figur outsider. Narasi ini menciptakan iklim skeptisisme dan keraguan terhadap fakta objektif, di mana "kebenaran" hanya berasal dari tokoh yang dipercaya secara emosional. Strategi ini memperkuat personalisasi kekuasaan dan "cult of personality". Namun, implikasinya mengancam stabilitas demokrasi dengan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan proses pemilihan yang adil.

No.	Tindak Tutar
1	"The media is corrupt. The system is rigged."
2	"I offered National Guard, but Nancy Pelosi rejected me."
3	"Our elections are bad, and a lot of these illegal immigrants coming in—they're trying to vote."
4	"They stole the election from me. The system is broken."
5	"We need to get rid of the deep state."

5. Strategi Personalisasi Kepemimpinan

Trump menempatkan dirinya sebagai pusat dari seluruh solusi nasional melalui personalisasi kepemimpinan yang kuat dan karismatik. Ia menjual dirinya bukan sebagai bagian dari sistem kolektif, melainkan sebagai figur tunggal yang tak tergantikan. Retorika ini membangun loyalitas tanpa syarat di antara pendukung, memperkuat citra otoritarian yang mengedepankan figur personal dibanding institusi. Namun, strategi ini berisiko melemahkan kepercayaan terhadap tatanan demokrasi berbasis institusi dan prosedur kolektif. Dalam komunikasi politik, personalisasi seperti ini dapat memperdalam kultus individu dan mengurangi ruang dialog demokratis. Strategi ini menjadi pedang bermata dua, efektif dalam mobilisasi tetapi berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi.

No.	Tindak Tutar
1	"Only I can fix it."
2	"I'm the only one who can make America great again."
3	"Everybody knows what I'm going to do—cut taxes and create a great economy."
4	"I rebuilt the military. I did a phenomenal job with the pandemic."
5	"I am the leader who gets things done."

Pembahasan

1. Strategi Polarisasi

Strategi polarisasi yang digunakan Donald Trump dalam debat kampanye 2024 memperlihatkan penggunaan wacana yang sengaja membedakan secara tajam antara dua kelompok sosial yang saling berseberangan, yaitu "kami" yang patriotik dan "mereka" yang dianggap merusak negara. Melalui analisis wacana kritis (Kurniawati et al., 2022; Payuyasa & others, 2024; Suharto et al., 2020), terlihat bagaimana Trump menggunakan dikotomi ini sebagai cara untuk membangun identitas kolektif yang kuat di antara para pendukungnya. Identitas kolektif tersebut dibangun tidak hanya melalui isi ujaran, tetapi juga melalui gaya retorik yang menggugah emosi dan memobilisasi afiliasi kelompok. Pengelompokan ini memudahkan penyederhanaan masalah politik kompleks menjadi sebuah narasi "baik vs jahat," yang mudah dipahami dan diterima oleh audiens. Strategi ini efektif untuk memperkuat loyalitas dan kohesi sosial dalam basis pendukung Trump, sekaligus memperbesar jarak dengan lawan politik. Namun, analisis juga mengungkap potensi risiko polarisasi yang berlebihan dalam memperburuk perpecahan sosial dan menimbulkan konflik

horizontal. Dalam konteks demokrasi deliberatif, polarisasi seperti ini menghambat dialog yang konstruktif dan inklusif. Oleh karena itu, strategi polarisasi harus dipandang sebagai pedang bermata dua yang menuntut perhatian kritis terhadap dampaknya.

Dalam debat, Trump secara berulang menekankan ancaman yang datang dari imigran ilegal dan kelompok yang dianggap kriminal, menggunakan bahasa yang eksplisit dan menimbulkan ketakutan. Penggunaan istilah-istilah tersebut merupakan teknik retorik yang secara efektif mengaktivasi emosi negatif dalam audiens, terutama ketakutan dan kecemasan. Dari sudut pandang analisis retorika, teknik ini berfungsi untuk mengkonstruksi musuh bersama yang menjadi alasan perlunya solidaritas kelompok. Hal ini memperkuat ikatan emosional antar pendukung dan mendorong mereka untuk melihat permasalahan sebagai pertarungan moral yang esensial. Analisis tematik juga menunjukkan bahwa isu ekonomi dan keamanan menjadi fokus utama dalam strategi polarisasi ini, yang kemudian diperkuat melalui narasi “kami melawan mereka.” Dengan demikian, strategi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan realitas politik dan sosial yang menjadi kekhawatiran utama audiens. Namun, pendekatan ini juga dapat memperparah stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, yang berpotensi mengganggu kohesi sosial jangka panjang. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami bagaimana polarisasi sebagai strategi retorik berdampak pada dinamika sosial-politik secara lebih luas.

Lebih jauh, analisis wacana mengungkap bahwa polarisasi yang dibangun Trump dalam debat turut memanfaatkan sentimen nasionalisme dan identitas budaya sebagai alat penguatan narasi. Dengan membingkai pendukungnya sebagai “rakyat sejati” yang patriotik dan bermoral, ia menciptakan batas tegas antara kelompok ini dengan “elit” atau “penjahat” yang dianggap mengkhianati nilai-nilai negara. Pola ini mengaktifkan sentimen keadilan distributif yang sering menjadi dasar keberpihakan politik dalam masyarakat yang terpolarisasi. Pendekatan ini sejalan dengan teori populisme (Muhtadi, 2019; Ritonga, 2020; Sitorus et al., 2023) yang mengutamakan oposisi tajam antara rakyat dan elit sebagai fondasi politik. Namun, penggunaan sentimen identitas secara intensif juga membawa risiko eksklusi sosial dan penurunan kualitas deliberasi demokratis. Dalam konteks komunikasi politik, penting untuk menyadari bahwa strategi ini dapat memperdalam jurang sosial sekaligus menjadi alat mobilisasi yang sangat kuat. Studi ini menyoroti bagaimana polarisasi dapat mengubah lanskap politik dan sosial secara fundamental.

Analisis retorika juga memperlihatkan bahwa narasi polarisasi yang digunakan Trump dibentuk melalui pilihan kata dan gaya bahasa yang eksplosif dan emosional. Teknik repetisi, hiperbola, dan framing negatif memperkuat kesan ancaman yang datang dari kelompok “mereka,” sehingga menciptakan rasa urgensi dan kewaspadaan di antara pendukungnya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan politik, tetapi juga mengarahkan persepsi publik ke dalam kerangka konflik yang tajam. Namun, strategi ini dapat menimbulkan konsekuensi serius berupa pengikisan rasa toleransi dan peningkatan polarisasi ekstrem (Djufri, 2025; Susilawati, 2023). Dengan demikian, meski strategi ini efektif secara politik, secara sosial ia menimbulkan tantangan bagi kohesi dan stabilitas nasional. Kajian ini menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan mobilisasi politik dengan pemeliharaan dialog sosial yang sehat. Oleh sebab itu, strategi polarisasi harus dianalisis tidak hanya dari efektivitasnya, tetapi juga dampak sosial-politik yang lebih luas.

Strategi polarisasi yang diidentifikasi dalam transkrip debat menunjukkan bagaimana Trump mampu menghubungkan isu-isu ekonomi, imigrasi, dan keamanan dalam satu narasi tunggal yang kohesif. Pendekatan ini memperlihatkan keterampilan retorik dalam menyusun pesan yang mudah diserap oleh audiens luas dengan latar belakang yang beragam. Melalui analisis tematik, terlihat bahwa isu-isu tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga saling memperkuat dan membentuk fondasi narasi populis. Hal ini menegaskan hipotesis bahwa polarisasi merupakan strategi multidimensional yang melibatkan aspek simbolik, ideologis, dan emosional. Namun, polarisasi yang berlebihan dapat memicu fragmentasi politik yang mendalam dan memperlemah solidaritas nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi polarisasi adalah elemen kunci

dalam retorika Trump yang memerlukan pengelolaan hati-hati dalam konteks demokrasi yang inklusif.

Lebih jauh lagi, strategi polarisasi Trump juga dapat dipahami dalam kerangka teori komunikasi politik yang menekankan pentingnya framing dan agenda setting. Dengan membingkai isu imigrasi dan keamanan sebagai ancaman utama, Trump mengarahkan perhatian publik dan membentuk opini yang menguntungkan posisinya. Analisis wacana kritis memperlihatkan bagaimana framing tersebut dilakukan secara sistematis untuk membangun narasi yang resonan dengan ketakutan dan aspirasi pemilih. Pendekatan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa framing politik dapat mengkondisikan persepsi dan respons audiens. Namun, penelitian ini juga mengingatkan bahwa framing yang bias dapat mengabaikan kompleksitas isu dan menghambat solusi yang inklusif. Oleh karena itu, strategi polarisasi merupakan instrumen yang kuat sekaligus problematik dalam komunikasi politik kontemporer.

Strategi polarisasi Trump tidak hanya berfungsi sebagai alat politik, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial-politik Amerika Serikat yang mengalami fragmentasi tajam. Melalui analisis wacana, dapat dilihat bahwa narasi polarisasi mencerminkan ketegangan identitas dan konflik nilai yang nyata di masyarakat. Strategi ini secara simbolik mengukuhkan posisi Trump sebagai pemimpin yang melawan status quo yang dipandang gagal. Namun, strategi ini juga berpotensi memperkuat sikap eksklusif dan menghambat rekonsiliasi sosial. Kajian ini menegaskan perlunya penelitian lanjutan yang mengkaji dampak jangka panjang dari polarisasi dalam demokrasi modern. Kesimpulannya, strategi polarisasi Trump adalah fenomena komunikasi politik yang kompleks dan multidimensional.

2. Strategi Demonisasi Lawan

Strategi demonisasi yang ditemukan dalam analisis wacana debat kampanye Trump memperlihatkan penggunaan bahasa yang kuat dan sarat emosi untuk melemahkan lawan politik secara sistematis. Labelisasi seperti "Marxist" dan tuduhan kegagalan kebijakan bukan sekadar retorika, melainkan merupakan konstruksi identitas yang menempatkan lawan sebagai ancaman eksistensial. Pendekatan analisis retorika mengungkap bahwa demonisasi ini berfungsi sebagai speech act yang menimbulkan ketakutan dan kemarahan, yang kemudian memicu reaksi mobilisasi dari basis pendukung. Dalam konteks teori identitas sosial, demonisasi berperan sebagai mekanisme penguatan solidaritas internal dengan cara mendiskreditkan "kelompok lain." Namun, demonisasi juga membatasi ruang untuk dialog politik yang sehat dan memperparah polarisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi ini efektif secara politis namun problematik secara sosial.

Demonisasi lawan dalam debat Trump tidak hanya berbentuk kritik kebijakan, tetapi juga serangan personal yang menargetkan karakter dan integritas lawan. Dengan demikian, strategi ini memperkuat moral panic dan menciptakan narasi konspirasi yang memengaruhi persepsi publik. Analisis tematik memperlihatkan bagaimana serangkaian ujaran hiperbolik dan penilaian negatif terus menerus membangun citra lawan sebagai musuh bersama. Pendekatan ini mencerminkan dinamika komunikasi politik yang memanfaatkan emosi negatif untuk memperkuat dukungan. Namun, pendekatan ini dapat merusak budaya demokrasi dan toleransi politik yang menjadi fondasi sistem pluralistik. Oleh karena itu, demonisasi sebagai strategi retorik harus dianalisis secara kritis dalam konteks dampaknya pada demokrasi deliberatif.

Dari perspektif analisis wacana kritis, strategi demonisasi juga mencerminkan penggunaan kekuasaan dalam komunikasi politik yang bertujuan mengendalikan narasi publik. Dengan mengendalikan wacana, Trump membatasi definisi kebenaran politik yang diterima masyarakat pendukungnya. Ini menghasilkan "realitas alternatif" yang memperkuat kepercayaan kelompok tertentu sambil menolak fakta objektif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep post-truth yang menempatkan emosi dan keyakinan pribadi di atas bukti empiris. Namun, konsekuensi dari strategi ini adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan media massa. Studi ini menegaskan perlunya pemahaman kritis tentang peran kekuasaan dalam produksi wacana politik.

Selain itu, demonisasi juga memperlihatkan hubungan erat dengan strategi polarisasi, di mana lawan tidak hanya dianggap berbeda, tetapi sebagai musuh yang harus dilawan dengan segala cara. Narasi semacam ini memicu antagonisme dan konflik politik yang tajam. Melalui analisis retorika, ditemukan bahwa demonisasi memperkuat pembentukan batas sosial yang rigid dan memperbesar jarak psikologis antar kelompok. Ini berdampak pada meningkatnya permusuhan dan penurunan kesediaan untuk berdialog atau berkompromi. Oleh karena itu, demonisasi berkontribusi signifikan pada fragmentasi sosial dan ketidakstabilan politik. Kajian ini menyarankan perlunya kebijakan komunikasi politik yang mampu menyeimbangkan antara kritik politik dan penghormatan terhadap pluralisme.

Penelitian ini memberi gambaran bahwa demonisasi lawan dalam debat Trump menggunakan teknik retorika yang cermat, seperti pengulangan dan hiperbola, untuk membangun resonansi emosional yang kuat. Strategi ini memudahkan penyebaran narasi negatif melalui media sosial dan komunikasi interpersonal. Analisis wacana kritis menyoroti bagaimana teknik-teknik ini memperkuat efek mobilisasi politik dan memperdalam keterikatan emosional dengan narasi yang disampaikan. Namun, penggunaan strategi demonisasi yang berlebihan dapat menyebabkan jenuh dan resistensi dari audiens yang lebih kritis. Oleh karena itu, efektivitas strategi ini bersifat dinamis dan bergantung pada konteks sosial-politik yang berkembang. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme komunikasi politik yang kompleks dan kontradiktif.

4. Strategi Anti-Institusi

Strategi anti-institusi Trump merupakan wacana delegitimasi terhadap lembaga formal yang selama ini menjadi pilar demokrasi, seperti media, sistem pemilu, dan lembaga pemerintahan. Melalui analisis wacana kritis, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana Trump menggunakan narasi skeptisisme dan ketidakpercayaan untuk mengalihkan dukungan kepada dirinya sebagai figur outsider. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa retorika anti-institusi tidak hanya menyoroti kelemahan institusi, tetapi juga menguatkan personalisasi kekuasaan dan *cult of personality*. Dari perspektif analisis retorika, bahasa yang dipilih menimbulkan iklim *post-truth* di mana fakta objektif diragukan dan narasi subjektif diprioritaskan. Strategi ini efektif dalam merangkul kelompok yang merasa terpinggirkan, tetapi mengancam stabilitas demokrasi dengan melemahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, strategi ini mencerminkan ambivalensi antara mobilisasi politik dan risiko erosi institusional.

Analisis tematik mengungkap bahwa Trump secara sistematis mengkonstruksi narasi bahwa institusi-institusi formal telah korup dan tidak efektif, sehingga perlu digantikan oleh figur yang dipercaya secara emosional. Ini merupakan teknik delegitimasi yang memperkuat citra dirinya sebagai alternatif yang jujur dan mampu memperbaiki sistem yang rusak. Pendekatan ini selaras dengan literatur komunikasi politik yang mengkaji retorika populis dan skeptisisme institusional. Namun, strategi anti-institusi juga mengundang kritik karena berpotensi melemahkan kepercayaan pada mekanisme demokrasi yang esensial. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan krisis legitimasi dan penurunan partisipasi politik. Studi ini menegaskan perlunya penanganan komunikasi politik yang mampu membangun kembali kepercayaan publik.

Dari segi retorika, strategi anti-institusi menggunakan pengulangan dan framing negatif untuk memperkuat pesan skeptisisme. Analisis wacana kritis menunjukkan bagaimana frasa seperti "The media is corrupt" dan "The system is rigged" membentuk narasi konsisten yang menyoroti kelemahan institusi. Pendekatan ini membentuk opini publik yang skeptis dan memupuk iklim ketidakpercayaan yang luas. Namun, konsekuensi sosialnya berupa meningkatnya polarisasi dan berkurangnya dialog berbasis fakta. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya kritik terhadap retorika yang berlebihan agar tidak melemahkan fondasi demokrasi. Dengan demikian, strategi ini harus dipahami dalam konteks dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas politik.

Analisis lanjutan juga memperlihatkan hubungan erat antara strategi anti-institusi dengan personalisasi kepemimpinan yang kuat. Narasi anti-institusi mempersiapkan audiens untuk menerima figur pemimpin tunggal yang dipercaya secara emosional sebagai solusi atas kegagalan

sistem. Hal ini memperkuat kultus individu dan mengurangi peran institusi sebagai penjaga demokrasi. Dari sudut pandang komunikasi politik, ini adalah fenomena yang menarik namun berisiko tinggi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kritik institusi dan penguatan sistem demokrasi. Strategi anti-institusi yang ditemukan mencerminkan tantangan besar bagi demokrasi modern.

Selain itu, pendekatan media digital mempercepat penyebaran narasi anti-institusi dengan intensitas yang tinggi. Analisis wacana kritis menegaskan bahwa platform digital menjadi medium efektif untuk memperkuat skeptisisme publik melalui resonansi emosional dan filter bubble. Hal ini menyebabkan narasi anti-institusi sulit diimbangi dengan narasi faktual dan kritis. Dampaknya adalah terfragmentasinya ruang publik dan meningkatnya kecenderungan post-truth politics. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan strategi komunikasi yang lebih edukatif dan inklusif dalam menghadapi fenomena ini. Strategi anti-institusi dalam era digital perlu dikelola dengan bijaksana agar demokrasi tidak terkikis.

Strategi anti-institusi yang dianalisis memperlihatkan pola retorika yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan ini menempatkan figur politik sebagai pusat kebenaran, menggantikan institusi tradisional. Narasi ini efektif untuk mobilisasi namun membawa risiko melemahkan mekanisme checks and balances demokrasi. Kajian ini menyoroti perlunya penelitian lanjutan terkait dampak sosial-politik dari narasi anti-institusi. Implikasi komunikatifnya penting untuk dipahami oleh praktisi dan akademisi. Dengan demikian, strategi ini merupakan fenomena komunikasi politik yang harus diperhatikan secara serius.

5. Strategi Personalisasi Kepemimpinan

Strategi personalisasi kepemimpinan Trump dalam debat kampanye 2024 menunjukkan retorika yang menempatkan dirinya sebagai figur sentral dan satu-satunya solusi bagi berbagai masalah nasional. Melalui analisis wacana kritis, ditemukan bahwa Trump secara sistematis membangun citra otoritas absolut yang mengandalkan karisma pribadi dan ketegasan janji. Pendekatan ini memperkuat loyalitas emosional basis pendukung dan menciptakan kultus individu yang kuat. Namun, analisis retorika juga menunjukkan risiko strategi ini dalam melemahkan mekanisme demokrasi berbasis institusi dan prosedur kolektif. Narasi yang menitikberatkan pada figur tunggal cenderung mengurangi ruang dialog kritis dan akuntabilitas politik. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa personalisasi kepemimpinan adalah fenomena komunikasi yang ambivalen dengan dampak sosial-politik yang signifikan.

Coding tematik mengungkap bahwa narasi personalisasi berfokus pada klaim unik yang hanya dapat dilakukan oleh Trump, seperti "Only I can fix it" dan "I rebuilt the military." Teknik pengulangan dan framing retoris ini memperkuat persepsi eksklusivitas dan keunikan kepemimpinan. Pendekatan ini efektif untuk menciptakan figur politik yang karismatik dan hampir tidak tergantikan dalam mata pendukung. Namun, strategi ini juga berpotensi membatasi partisipasi kolektif dan mereduksi legitimasi institusional. Kajian ini menegaskan pentingnya melihat strategi personalisasi dalam konteks keseimbangan demokrasi dan otoritarianisme. Strategi ini harus dipahami sebagai bagian dari dinamika komunikasi politik modern yang kompleks.

Dari perspektif teori komunikasi politik, personalisasi kepemimpinan merupakan bentuk retorika otoritarian yang menuntut kepercayaan penuh pada individu, bukan pada sistem dan institusi. Retorika ini menonjolkan figur pemimpin sebagai pusat pengambilan keputusan dan sumber kebenaran. Pendekatan ini memperkuat loyalitas tanpa syarat, namun mengorbankan transparansi dan mekanisme pengawasan yang vital dalam demokrasi. Analisis wacana kritis mengindikasikan bahwa personalisasi kepemimpinan membentuk hubungan emosional yang intens antara pemimpin dan pendukung, yang dapat memperdalam polarisasi. Oleh karena itu, strategi ini membawa konsekuensi ganda yang perlu dipertimbangkan dalam konteks demokrasi modern. Kajian ini menyarankan pemahaman kritis atas implikasi komunikasi personalisasi.

Selain itu, strategi personalisasi juga berkaitan erat dengan narasi anti-institusi yang sebelumnya dibahas. Dengan melemahkan institusi formal, Trump menempatkan dirinya sebagai

satu-satunya figur yang dipercaya dan dapat mengatasi kegagalan sistem. Pendekatan ini memperkuat citra outsider yang revolusioner dan unik. Namun, dampaknya adalah potensi erosi mekanisme demokrasi yang sehat dan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Analisis tematik dan wacana menunjukkan bahwa hubungan retorik antara personalisasi dan anti-institusi sangat erat dan saling memperkuat. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya studi mendalam atas hubungan ini dalam komunikasi politik kontemporer. Fenomena ini menjadi tantangan utama bagi demokrasi modern.

Dalam konteks media digital, strategi personalisasi kepemimpinan diperkuat melalui penyebaran pesan yang intensif dan langsung ke basis pendukung. Platform digital memfasilitasi hubungan emosional yang mendalam antara figur pemimpin dan publik, sekaligus memperkuat loyalitas. Analisis wacana kritis menyoroti bagaimana media digital mempercepat pembentukan narasi karismatik dan personalisasi yang masif. Namun, hal ini juga memunculkan risiko distorsi informasi dan peningkatan polarisasi. Penelitian ini menegaskan perlunya pengelolaan komunikasi digital yang etis dan kritis. Strategi personalisasi dalam era digital harus diimbangi dengan upaya memperkuat mekanisme demokrasi dan pendidikan publik.

Penutup

Penelitian ini telah mengungkap secara mendalam bagaimana Donald Trump menggunakan lima strategi politik dan retorik utama dalam debat kampanye Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024, yaitu polarisasi, demonisasi lawan, nasionalisme emosional, retorika anti-institusi, dan personalisasi kepemimpinan. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis dan retorika, studi ini memberikan gambaran holistik tentang pola komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada mobilisasi politik, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial-politik yang kompleks dan terpolarisasi. Temuan menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut secara efektif memperkuat loyalitas pendukung dan mendiskreditkan lawan, namun juga berpotensi memperdalam fragmentasi sosial dan mengancam stabilitas demokrasi. Analisis kritis menyoroti dilema antara efektivitas komunikasi politik dan tanggung jawab sosial yang melekat. Studi ini menegaskan pentingnya pemahaman multidimensional terhadap strategi retorik dalam konteks demokrasi modern yang dipengaruhi oleh dinamika media digital dan budaya pasca-kebenaran. Hasil penelitian ini membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana komunikasi politik dapat dikelola secara etis demi memperkuat dialog inklusif dan kohesi sosial. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori komunikasi politik kontemporer, khususnya dalam menganalisis fenomena populisme dan retorika karismatik. Dengan demikian, kajian ini memiliki nilai penting baik secara akademik maupun praktis dalam konteks politik global saat ini.

Hasil penelitian ini mengingatkan para praktisi politik dan pembuat kebijakan akan dampak ganda dari strategi komunikasi yang dipilih selama kampanye. Sementara strategi seperti polarisasi dan demonisasi efektif dalam menggalang dukungan, mereka juga membawa risiko meningkatnya ketegangan sosial dan melemahnya institusi demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan praktik komunikasi politik yang seimbang antara persuasi dan tanggung jawab sosial. Media dan masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran kritis dalam menerima dan merespons pesan politik, terutama dalam era media digital yang cepat dan luas. Kajian ini juga mendorong penelitian lanjutan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari retorika populis dan personalisasi kepemimpinan terhadap demokrasi. Pemahaman kritis terhadap strategi komunikasi politik semacam ini sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Akhirnya, studi ini berharap dapat menjadi referensi bagi upaya memperbaiki dialog politik yang sehat dan membangun masyarakat yang lebih kohesif. Komunikasi politik yang bertanggung jawab menjadi kunci dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Bliuc, A.-M., Bouguettaya, A., & Felise, K. D. (2021). Online intergroup polarization across political fault lines: An integrative review. *Frontiers in Psychology, 12*, 641215.
- Chigbu, G. U., Aboh, S. C., & Ganaah, J. (2025). Religious othering in Nigeria's electoral discourse: Towards a critical religious tolerance. *Discourse & Society, 36*(1), 39–59.
- Djufri, D. (2025). Budaya Algoritmik: Bagaimana AI Membentuk Identitas Manusia dan Norma Sosial. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 8*(2), 176–184.
- Esau, K. (2025). The Quality of Connections: Deliberative Reciprocity and Inclusive Listening as Antidote to Destructive Polarization Online. *Social Media+ Society, 11*(2), 20563051251332420.
- Hand, J. (2020). *Identity politics of the Alt Right: social identity theory applied*.
- Hossain, M. I. (2024). Creation of 'other' in their own country, politicized identity-based division, and the rise of hostility toward 'out-group' in a multi-ethnic, poly-cultural world: a study on genocide prevention, human security, and peacebuilding. *Social Identities, 30*(2), 88–109.
- Jamal, A. (2024). Political Polarization in the Digital Age: A Social Science Inquiry. *Physical Education, Health and Social Sciences, 2*(1), 11–18.
- Kurniawati, W., Ekoyanantiasih, R., Yulianti, S., Hardaniawati, M., Sasangka, S. S. T. W., & Firdaus, W. (2022). Kekuasaan Semantik dalam Analisis Wacana Kritis Debat Capres-Cawapres. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 11*(1), 165–179.
- López-García, G., & Pavia, J. M. (2019). Political communication in election processes: an overview. *Contemporary Social Science, 14*(1), 1–13.
- Marino, E. B., Benitez-Baleato, J. M., & Ribeiro, A. S. (2024). The polarization loop: How emotions drive propagation of disinformation in online media—The case of conspiracy theories and extreme right movements in southern Europe. *Social Sciences, 13*(11), 603.
- McCombs, M., & Valenzuela, S. (2020). *Setting the agenda: Mass media and public opinion*. John Wiley & Sons.
- McCoy, J., & Somer, M. (2019). Toward a theory of pernicious polarization and how it harms democracies: Comparative evidence and possible remedies. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 681*(1), 234–271.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural*. Intrans Publishing.
- Payuyasa, I. N., & others. (2024). Pilihan Diksi dalam Kontestasi Pilpres 2024 dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan Literasi. *Jurnal Penjaminan Mutu, 10*(01), 32–44.
- Piazza, J. A. (2023). Political polarization and political violence. *Security Studies, 32*(3), 476–504.
- Rhodes, S. C. (2022). Filter bubbles, echo chambers, and fake news: How social media conditions individuals to be less critical of political misinformation. *Political Communication, 39*(1), 1–22.
- Ritonga, A. D. (2020). Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12*(1), 1–13.
- Rodilloso, E. (2024). Filter bubbles and the unfeeling: How AI for social media can foster extremism and polarization. *Philosophy & Technology, 37*(2), 71.
- Sahly, A., Shao, C., & Kwon, K. H. (2019). Social media for political campaigns: An examination of Trump's and Clinton's frame building and its effect on audience engagement. *Social Media+ Society, 5*(2), 2056305119855141.
- Sitorus, P., Pasaribu, J., & others. (2023). Religious and sustainability: Studi integrasi antara pentakostalisme, populisme, dan politik. *KURIOS, 10*(1), 77–91.
- Suharto, T., Prasetyo, B. D., & Wulandari, M. P. (2020). Analisis Wacana Kritis Komunikasi Verbal pada Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3*(2), 43–54.
- Susilawati, Y. (2023). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik

